

---

## ANALISIS *VALUE FOR MONEY* UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2015-2019

C. Susi Maryanti<sup>1</sup>; Agus Munandar<sup>2</sup>

Magister Akuntansi, Universitas Esa Unggul, Jakarta<sup>1,2</sup>

Email : csusimaryanti@gmail.com<sup>1</sup>; agus.munandar@esaunggul.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat ekonomis, tingkat efisiensi dan efektivitas keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2015-2019 dengan memakai analisis value for money. Penelitian menggunakan data sekunder dari situs website Pemerintah Kota Surabaya dan website Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Hasilnya penelitian ditinjau dari tingkat ekonomis adalah bahwa pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 Pemerintah Kota Surabaya berhasil mencapai tingkat ekonomis kinerja antara 80% sampai 90% dengan kriteria cukup ekonomis. Kondisi tahun 2019 meningkat menjadi 92,24% yang berarti tingkat ekonomisnya menurun menjadi kategori kurang ekonomis. Dari segi efisiensi hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kurang efisien pada tahun 2015 dan tahun 2017 dan tidak efisien pada tahun 2016, 2018 dan 2019. Rata-rata tingkat efisiensi selama 5 tahun adalah 101.18% yang artinya masuk kategori tidak efisien. Hasil perhitungan tingkat efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya pada tahun 2015 adalah efektif sebesar 99.65%, sedangkan untuk tahun 2016 sampai dengan 2019 masuk dalam kategori sangat efektif yaitu berkisar antara 100.37% sampai dengan 101.63%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya dapat dikatakan sangat efektif dalam pengelolaan pendapatan dengan tingkat efektivitas rata-rata adalah sebesar 100.88%.

Kata kunci : Analisis *Value for Money*; Kinerja Keuangan Daerah; Ekonomis; Efisiensi; Efektivitas

### ABSTRACT

*This research was conducted to measure the level of economical, efficiency and effectiveness of the regional finance of the Surabaya City Government for the 2015-2019 fiscal year using value for money analysis. The research used secondary data from the Surabaya City Government website and the Surabaya City Regional Tax and Financial Management Agency website. The result of the research in terms of the economical level is that in the 2015 to 2018 fiscal year, the Surabaya City Government managed to achieve an economical level of performance between 80% to 90% with Quite Economical criteria. Conditions in 2019 increased to 92.24%, which means the Economic level decreased to the Less Economical category. In terms of efficiency, the results show that the level of efficiency in the financial performance of the Surabaya City local government from 2015 to 2019 was Less Efficient in 2015 and 2017 and Inefficient in 2016, 2018 and 2019. The average efficiency level for 5 years was 101.18. % which means it is categorized as Inefficient. The results of the calculation of the effectiveness of the financial performance of the Surabaya City local government in 2015 were Effective at 99.65%, while for 2016 to 2019 it was in the Very Effective*

*category, ranging from 100.37% to 101.63%. This condition illustrates that the financial performance of the Surabaya City government can be said to be Very Effective in managing income with an average effectiveness level of 100.88 %.*

*Keywords : Value for Money Analysis; Regional Financial Performance; Economical; Efficiency; Effectiveness*

## PENDAHULUAN

Sejak dibentuknya Undang-Undang No. 20 dan No. 25 Tahun 1999, mengenai pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Indonesia memberlakukan kebijakan Otonomi Daerah. Acuan pemerintah daerah untuk melakukan otonomi daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seberapa besar kekuatan keuangan daerah dalam menanggung kebutuhan daerahnya dapat menjadi indikator apakah otonomi daerah pada aspek keuangan berhasil atau tidak. Karena hal tersebut maka dibutuhkan sebuah penilaian kinerja keuangan daerah agar dijadikan sebagai parameter saat suatu kebijakan tahun anggaran berikutnya ditetapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut (Badrudin 2017) adalah sebagai perencanaan keuangan yang berisi anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah untuk mencapai tujuan rencana pembangunan yang telah dibuat, sesuai dengan peraturan daerah. APBD dinyatakan dalam bentuk satuan uang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan daerahnya, sebagai catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurut (Kurnia 2016) pengelolaan APBD harus memiliki standar yang digunakan sebagai acuan bahwa sebuah daerah dapat dikatakan mandiri, efektif dan efisien. Maka dibutuhkan sebuah pengukuran kinerja keuangan daerah agar digunakan sebagai parameter ketika menetapkan suatu kebijakan pada tahun anggaran berikutnya.

Cara menghitung hasil pencapaian sebuah entitas adalah dengan mengukur kinerjanya. Keberhasilan lembaga pemerintah sebagai sektor publik membuat masyarakat akan mengapresiasi dengan baik pula kepada lembaga tersebut. Fokus masyarakat lebih terpusat pada kinerja Pemerintah Pusat sehingga kinerja Pemerintah Daerah terabaikan. Kinerja keuangan menurut (Mulyadi 2009) adalah sebuah pemaparan berhasil atau tidaknya kinerja operasional. Penting bagi masyarakat mengetahui bahwa kinerja Pemerintah Daerah berhubungan langsung dengan keuntungan yang akan diperoleh masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya. Oleh

sebab itu Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban atas pengelolaan program-program dari pemerintah dan mempertanggungjawabkan kinerjanya tersebut.

Pengukuran kinerja keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat indikator di atas, salah satunya dengan analisis *value for money*. Analisis ini mempunyai dua manfaat yaitu mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan keuangan dikelola dan pendayagunaan aset yang dimiliki daerah (Jumingan, 2006). Konsep *value for money* adalah perhitungan yang menitikberatkan pada prinsip ekonomis, efisien dan efektif (3E), sebagai prinsip penting pengelolaan anggaran pemerintah yang ekonomis dengan meminimalkan input dengan menghindari pemborosan pengeluaran, efisien dengan mencapai output maksimal dengan input minimal dan efektif dengan mencapai target yang sudah ditetapkan (Mardiasmo, 2009)

Surabaya sebagai kota metropolitan kedua terbesar di Indonesia setelah Jakarta merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur. Dijuluki sebagai kota pahlawan, Surabaya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Sebagai pusat perekonomian di Jawa Timur, Surabaya menjadi pusat kegiatan pendidikan, ekonomi dan sosial budaya yang menjadi magnet bagi masyarakat untuk bekerja dan berbisnis dan juga mencari hiburan sehingga banyak transaksi yang terjadi di Kota Surabaya. Kondisi ini akan mempengaruhi pemasukan dan pengeluaran Kota Surabaya. Pajak dan retribusi yang tinggi menjadi pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Sedangkan di pihak lain biaya belanja daerah dan belanja langsung untuk pembangunan fasilitas publik yang lebih lengkap dan memadai terus meningkat. Agar dapat mengetahui kinerja keuangan Surabaya dari sektor keuangan maka perlu dilakukan penelitian terhadap kinerja keuangan Pemkot Surabaya dengan memakai analisis *value for money*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengukuran Kinerja

Menurut Halim (2012: 129), pengukuran kinerja adalah alat manajemen mengukur keberhasilan suatu organisasi. Di organisasi sektor publik, kesuksesan suatu organisasi dinilai dari kemampuannya memberikan layanan publik yang bisa dijangkau dan memiliki kualitas. Jika instansi sektor publik dapat menyediakan layanan publik yang terjangkau dan memiliki kualitas, mereka dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan publik.

Menurut Mahsun (2013:25), kinerja sebagai gambaran tingkat pencapaian yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan atau kebijakan atau program guna mencapai tujuan, sasaran, misi serta visi organisasi yang tertuang di rencana strategis organisasi. Kata "kinerja" sering dipakai untuk menunjuk level pencapaian atau kesuksesan individu. Tanpa adanya goal maupun tujuan, kinerja perorangan atau organisasi tidak akan didapati karena tidak ada tolak ukurnya.

Pengukuran kinerja yaitu evaluasi pencapaian perwujudan kegiatan sebuah organisasi berlandaskan tujuan dan sasaran serta standar dan kriteria yang telah ditentukan. Informasi atas pengukuran ini juga akan berfungsi sebagai referensi untuk menetapkan tolok ukur kinerja di masa mendatang. Besaran nilai target yang menjadi dasar perolehan periode selanjutnya juga tergantung dari hasil evaluasi kinerja.

### ***Value for Money***

Menurut Mardiasmo (2009:4) *Value for Money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik berdasarkan 3 sumbu: ekonomi, efisiensi dan efisiensi. Pengukuran kinerja didasarkan pada metrik pembagian biaya (faktor dan efisiensi) dan metrik kualitas layanan. Maka metode ini lebih dikenal sebagai ukuran 3E: ekonomis, efisien, dan efektif (Mahsun, 2013:181).

### **Pengukuran Ekonomi**

Dalam bahasa organisasi pemerintah, ukuran ekonomi dinyatakan sebagai anggaran yang didistribusikan untuk membiayai kegiatan tertentu. Penghematan terjadi ketika sumber daya yang dikeluarkan lebih kecil dari anggaran. Di sisi lain, menggunakan sumber daya melebihi anggaran adalah pemborosan. Ekonomi dapat dirumuskan sebagai (Mahmudi, 2011: 21):

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{input}}{\text{harga input (Rp)}} \times 100\%$$

Menurut Purwiyanti (2017) perhitungan kinerja dari aspek ekonomis adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{input}}{\text{harga input}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

### **Pengukuran Efisiensi**

Renyowijoyo (2013:4) berpendapat bahwa efisiensi adalah mendapatkan hasil maksimal dari investasi tertentu, atau menggunakan jumlah investasi paling sedikit guna mencapai hasil tertentu. Makin besar output versus input, makin tinggi tingkat efektivitas organisasi. Efisiensi dirumuskan sebagai (Mahmudi, 2011: 22):

$$Efisiensi = \frac{output}{input} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dari segi efisiensi menurut Purwiyanti (2017) adalah sebagai berikut:

$$Rasio Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

$$Rasio Efisiensi = \frac{Realisasi Pengeluaran}{Anggaran Pendapatan} \times 100\%$$

### **Pengukuran Efektifitas**

Renyowijoyo (2013: 4) berpendapat dalam bukunya bahwa efektivitas sebagai level hasil program yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan. Jadi, efektifitas adalah perbandingan antara outcome dengan output. Efisiensi dirumuskan sebagai (Mahmudi, 2011: 22):

$$Efektifitas = \frac{outcomes}{output} \times 100\%$$

Perhitungan yang dapat dilakukan untuk mengukur kinerja dari aspek efektivitas adalah sebagai berikut (Purwiyanti, 2017):

$$Rasio Efektifitas = \frac{outcomes}{output} \times 100\%$$

$$Rasio Efektifitas = \frac{Realisasi Pendapatan}{Anggaran Pendapatan} \times 100\%$$

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Undang-Undang No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 yang mengutamakan proses reformasi lembaga sektor publik di Indonesia. Kedua undang-undang ini menjadi pijakan bagi serangkaian reformasi kelembagaan yang bertujuan untuk membangun pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3(2) mengharuskan satuan tugas perangkat daerah membuat laporan pelaksanaan anggaran untuk mengevaluasi hasil yang dicapai. Demikian pula PP No. 108, 2000 tentang syarat

prestasi kepala daerah, bahwa kepala daerah dimintai pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran. Guna penyampaian laporan kewajiban yang berisi Laporan Perhitungan dan Norma Perhitungan APBD, Laporan Arus Kas dan Neraca Daerah lengkap dengan penilaian performa.

Penanganan keuangan daerah tidak terlepas adanya UU Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemeriksaan Pertanggungjawaban. Dengan disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, berbagai prinsip dasar yang terkandung dalam UU Perbendaharaan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan UU Pengelolaan dan Pemeriksaan Pertanggungjawaban Perbendaharaan Negara ditegaskan kembali dan menjadi acuan.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Penelitian ini mengambil objek Pemerintah Kota Surabaya dengan penekanan pada perhitungan nilai performa keuangan dengan analisis value for money dari sisi ekonomis, dari sisi efisiensi serta dari sisi efektivitas anggaran. Data yang dipakai yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diambil langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, serta dari situs website Pemkot Surabaya dan website Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya tahun 2015-2019.

Analisis teknis data yang dibutuhkan untuk analisis ini adalah *Collecting / Pengumpulan Data*, terkait dengan realisasi dan pelaporan anggaran dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah yang didapat dari pengamatan. Hasilnya didokumentasikan dalam bentuk tulisan. Selain itu adalah dengan reduksi data, dengan memilih yang paling penting yang sesuai dengan fokus analisis. Dalam penelitian ini, penulis fokus ke laporan pelaksanaan serta anggaran instansi. Penulis mengklarifikasi dahulu data pelaksanaan serta anggaran yang diperoleh, dan mengolah serta menganalisis data tersebut dan menghubungkan keterkaitan semua data diperoleh dengan teori yang ada. Seperti yang dijelaskan dalam tinjauan literatur, penulis

mengukur kinerja keuangan terkait profitabilitas dengan cara kalkulasi Value for Money yang berisi 3 aspek teknik perhitungan yaitu aspek ekonomis, aspek efisiensi serta aspek efektivitas yang setiap aspeknya saling berkaitan (Mardiasmo, 2009).

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dari aspek ekonomis atas performa keuangan pemda/pemkot sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 bisa dilihat di tabel 1. Pengukuran kinerja dari aspek efisiensi atas performa keuangan pemda/pemkot sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 di tabel 2. Pengukuran kinerja dari aspek efektivitas atas performa keuangan pemda/pemkot sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 bisa di cermati sesuai tabel 3.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Ekonomis Kinerja Keuangan Pemkot Surabaya

Ditetapkannya otonomi daerah menuntut pemda agar mampu mengatur keuangan wilayah otonomnya dengan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi biaya kebutuhan daerahnya disertai pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pengukuran tingkat ekonomis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya bisa dicermati di tabel 4.

Sesuai dengan tabel 4, bisa dicermati bahwa di tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 Pemerintah Kota Surabaya berhasil mencapai tingkat ekonomis kinerja antara 80% sampai 90% dengan kriteria cukup ekonomis. Kondisi cukup stabil antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dengan tingkat ekonomis sekitar 88%, namun kondisi berubah pada tahun 2019 yang meningkat menjadi 92,24% yang berarti tingkat ekonomisnya menurun menjadi kategori kurang ekonomis. Kondisi ini mencerminkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya kurang sedikit melakukan penghematan anggaran belanja.

Dari tabel pengukuran tingkat ekonomis dapat dibuat grafik rasio antara anggaran belanja dengan realisasi belanja Pemkot Surabaya Tahun 2015-2019 seperti gambar 1.

### Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Analisis selanjutnya adalah efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan membandingkan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. Cara mengukur tingkat efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan biaya pengeluaran dengan realisasi atas pendapatan yang diterima daerah. Pengukuran tingkat efisiensi performa keuangan Pemkot Surabaya dapat dilihat di tabel 5.

Dari tabel pengukuran tingkat efisiensi bisa dibuat grafik rasio antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan Pemkot Surabaya Tahun 2015-2019, terwakili oleh gambar 2.

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi performa keuangan Pemkot Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kurang efisien pada tahun 2015 dan tahun 2017 dan tidak efisien pada tahun 2016, 2018 dan 2019. Rata-rata tingkat efisiensi selama 5 tahun adalah 101.18% yang artinya masuk kategori tidak efisien. Ketidakefisiensinya anggaran pemerintah daerah Kota Surabaya disebabkan karena pemborosan di beberapa sektor yang tidak semestinya terjadi. Misalnya untuk fasilitas publik yang sudah memadai masih tetap dilakukan renovasi dan pengembangan. Anggaran belanja barang dan jasa meningkat setiap tahunnya. Rata-rata kenaikan anggaran belanja barang dan jasa adalah 14.16% per tahun dengan kenaikan terbesar pada tahun 2016 sebesar 22.30% dan terendah sebesar 9.12% pada tahun 2018. Anggaran belanja pegawai juga menyumbang tingkat tidak efisiensi meningkat. Secara rata-rata lima tahun kenaikan belanja pegawai memang tidak terlalu tinggi yaitu sebesar 1.74% karena pada tahun 2017 sempat terjadi penurunan anggaran belanja pegawai sebesar 5.54%. Tetapi apabila tahun 2017 tidak terjadi penurunan maka rata-rata kenaikan belanja pegawai per tahun adalah 2.85%.

#### **Analisis Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya**

Dalam analisis efektivitas performa keuangan pemerintah daerah akan dijelaskan tingkat kinerja keuangan daerah dengan cara merasiokan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Di tabel 7 dapat dicermati tingkat efektivitas performa keuangan Pemkot Surabaya sejak tahun 2015 hingga tahun 2019.

Mengacu ke tabel 7 terlihat bahwa level efektivitas kinerja keuangan Pemkot Surabaya pada tahun 2015 adalah efektif sebesar 99.65%, sedangkan untuk tahun 2016 sampai dengan 2019 terjadi kenaikan dan masuk dalam kategori sangat efektif yaitu berkisar antara 100.37% sampai dengan 101.63%. Kondisi ini menggambarkan bahwa

kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya dapat dikatakan sangat efektif dalam pengelolaan pendapatan dengan tingkat efektivitas rata-rata adalah sebesar 100.88% dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2015 sampai 2019.

Dari tabel pengukuran tingkat efektivitas dapat dibuat grafik rasio antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan Pemkot Surabaya Tahun 2015-2019 seperti yang tercermin pada gambar 3.

### KESIMPULAN

Sesuai dengan analisis data dan hasil pembahasan maka kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya dapat disimpulkan seperti yang bisa dilihat di tabel 8. Dari analisis aspek ekonomis terlihat bahwa performa Pemkot Surabaya cukup ekonomis pada di tahun 2015 sampai 2018 dan menjadi kurang ekonomis pada tahun 2019. Tingkat ekonomis cukup stabil dalam rentang waktu 5 tahun dan memiliki rata-rata pencapaian senilai 87.74%. Keadaan ini menginformasikan bahwa performa keuangan Pemkot Surabaya secara ekonomis bisa dipertahankan agar indeksinya tidak naik lagi di periode anggaran yang akan datang.

Dari aspek efisiensi, pada tabel 8 menunjukkan bahwa performa keuangan Pemkot Surabaya tahun 2015 hingga tahun 2019 berkisar antara 98.06% sampai dengan 104.77%. Secara rata-rata selama lima tahun masuk dalam kriteria tidak efisien dengan rasio sebesar 101.18%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kota Surabaya masih agak boros. Pemerintah daerah belum bisa memenuhi target efisiensi yaitu penggunaan dana minimal untuk hasil maksimal. Pemborosan masih terjadi di sektor belanja barang dan jasa yang bisa disiasati dengan melakukan belanja barang dan jasa berdasarkan tingkat prioritas kebutuhan masyarakat serta sektor belanja pegawai yang bisa disiasati dengan pengaturan perjalanan dinas sesuai tingkat prioritas dan pembatasan penyediaan kendaraan dinas baru di seluruh instansi Pemkot Surabaya.

Dari segi efektivitas, performa keuangan Pemkot Surabaya untuk tahun anggaran 2015-2019 menunjukkan bahwa tahun 2015 masuk kriteria efektif dengan rasio sebesar 99.65% dan tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 masuk kriteria sangat efektif dengan rasio di atas 100%. Tingkat efektivitas rata-rata selama lima tahun sebesar 100.88%, masuk kategori sangat efektif. Keadaan ini membuktikan bahwa

pemerintah daerah Kota Surabaya sudah memiliki kinerja keuangan yang efektif dan mampu merealisasikan program sesuai harapan.

#### REFERENSI

- Aditya Perdana, Tito. (2020). Mengukur Kinerja APBD Kota Surabaya Analisis Value for Money. *Jurnal INOVASI*, 16(2), 339-346.
- Badrudin, Rudi. (2003). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Halim, Abdul. Kusufi, Muhammad Syam. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ke-2. Jakarta: Salemba Empat.
- Kepmendagri. 1996. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*.
- Kurnia, Sri. (2016). "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dengan Menggunakan Metode Value for Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang." Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun, Mohammad., dkk. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ke-2. BPFY Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: ANDI.
- Muindro, Renyowijoyo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purwiyanti, D. (2017). Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value for Money pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *Jurnal Katalogis*, 5(3), 190-200.
- Peraturan Pemerintah RI. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Siswo Abdulaziz, Nuzulul. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2019. *Jurnal of Economic Development Issues (JEDI)*, Vol. 4 No. 2.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

#### GAMBAR DAN TABEL

Tabel 1. Tingkat Ekonomis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kategori	Rasio Kinerja
Tidak Ekonomis	diatas 100%
Kurang Ekonomis	90% - 100%
Cukup Ekonomis	80% - 90%
Ekonomis	60% - 80%
Sangat Ekonomis	kurang dari 60%

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

Tabel 2. Tingkat Efisien Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kategori	Persentase Kinerja
Tidak Efisien	diatas 100%
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	kurang dari 60%

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

Tabel 3. Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

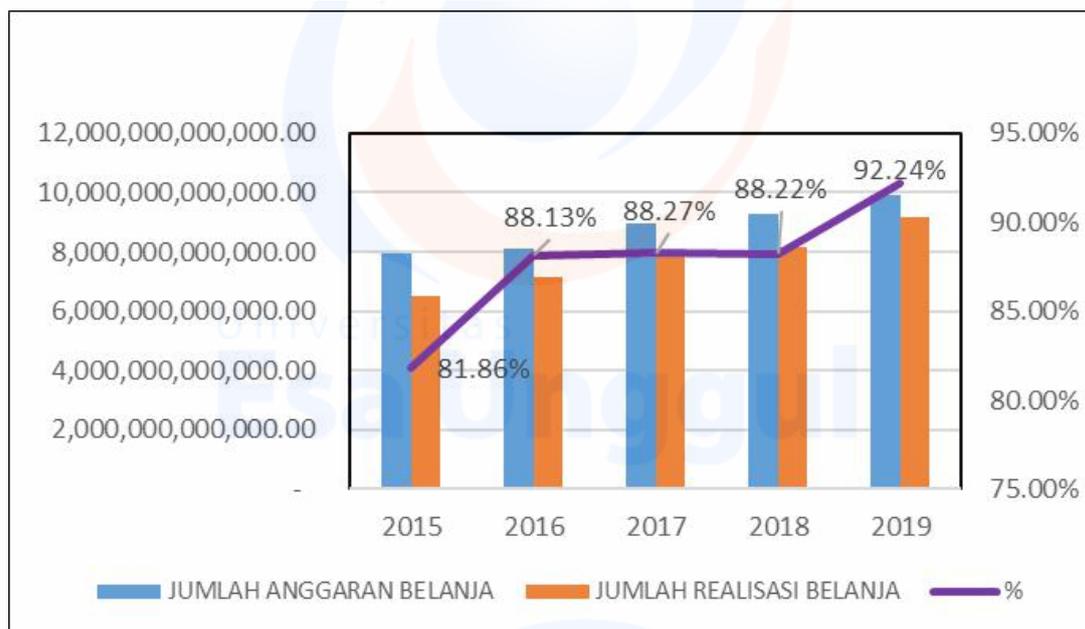
Kategori	Persentase Kinerja
Sangat Efektif	diatas 100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	kurang dari 60%

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

Tabel 4. Pengukuran Tingkat Ekonomis Kinerja Keuangan Pemkot Surabaya Tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
2015	7,928,337,395,393.00	6,490,359,759,532.00	81.86%
2016	8,115,231,350,395.00	7,151,661,549,430.48	88.13%
2017	8,963,930,686,060.00	7,912,409,152,257.09	88.27%
2018	9,268,450,333,673.00	8,176,929,496,298.63	88.22%
2019	9,933,509,442,785.00	9,162,655,939,831.57	92.24%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Surabaya, diolah, 2021

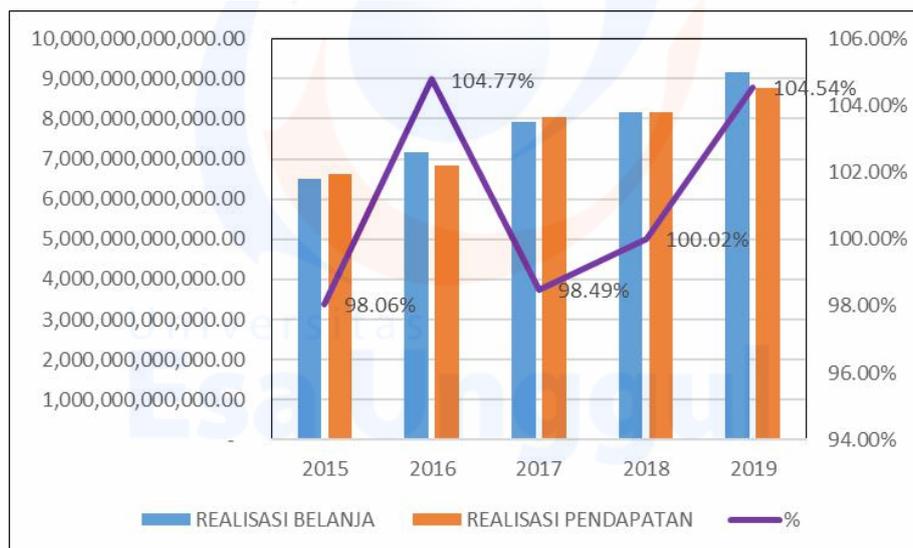


Gambar 1. Grafik Pengukuran Tingkat Ekonomis Kinerja Keuangan Pemkot Surabaya  
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Surabaya, diolah, 2021

Tabel 5. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja Keuangan Pemkot Surabaya Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi		%
	Belanja	Pendapatan	
2015	6,490,359,759,532.00	6,619,031,160,936.37	98.06%
2016	7,151,661,549,430.48	6,825,754,275,891.53	104.77%
2017	7,912,409,152,257.09	8,033,573,163,669.67	98.49%
2018	8,176,929,496,298.63	8,175,219,120,669.10	100.02%
2019	9,162,655,939,831.57	8,765,153,020,782.67	104.54%

Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kota Surabaya, diolah, 2021



Gambar 2. Grafik Tingkat Efisiensi Kinerja Keuangan Pemkot Surabaya Tahun 2015-2019  
Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kota Surabaya, diolah, 2021

Tabel 6. Kenaikan Anggaran Belanja Tahun 2015-2019

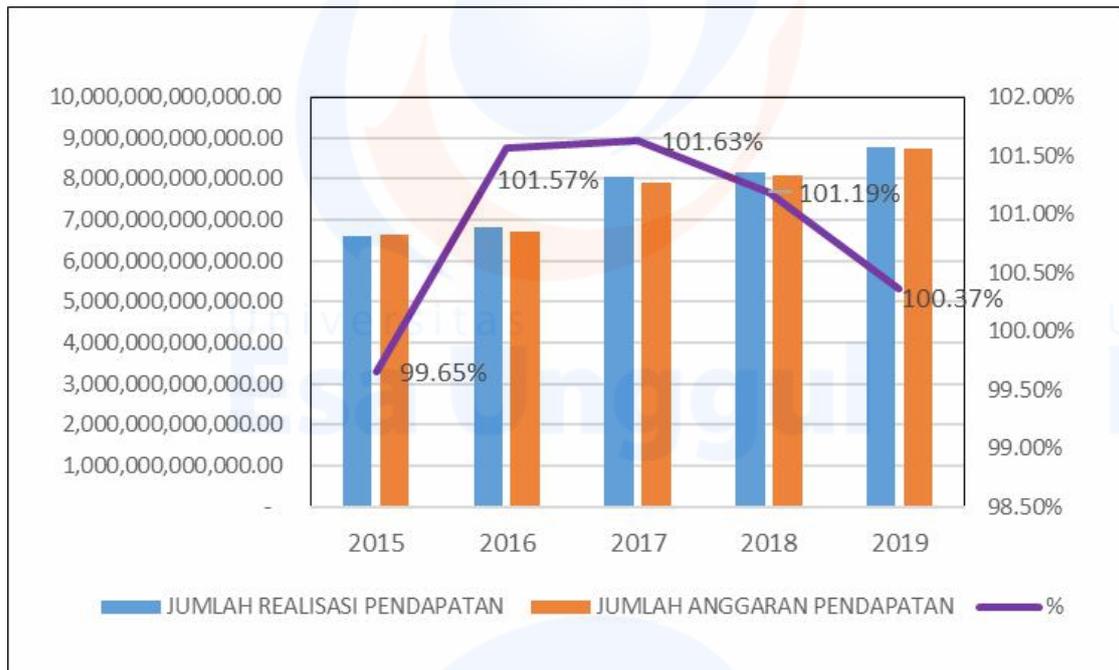
Tahun	Anggaran Belanja			
	Belanja Pegawai	Naik/Turun	Belanja Barang & Jasa	Naik/Turun
2015	2,579,203,525,763.00	3.26%	2,417,183,344,025.00	14.20%
2016	2,711,905,402,999.00	5.15%	2,956,213,760,468.00	22.30%
2017	2,561,530,634,574.00	-5.54%	3,360,370,631,852.00	13.67%
2018	2,635,973,536,954.00	2.91%	3,666,769,874,931.00	9.12%
2019	2,713,569,439,655.00	2.94%	4,088,673,664,945.00	11.51%
Rata-rata		1.74%		14.16%

Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kota Surabaya, diolah, 2021

Tabel 7. Pengukuran Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan Pemkot Surabaya Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	%
2015	6.619.031,160,936.37	6,642,257,716,374.00	99.65%
2016	6,825,754,275,891.53	6,720,301,543,490.00	101.57%
2017	8,033,573,163,669.67	7,904,894,969,358.00	101.63%
2018	8,175,219,120,669.10	8,079,142,194,268.00	101.19%
2019	8,765,153,020,782.67	8,733,224,623,734.00	100.37%

Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kota Surabaya, diolah, 2021



Gambar 3. Grafik Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan Pemkot Surabaya Tahun 2015-2019  
Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kota Surabaya, diolah, 2021

Tabel 8. Hasil Analisis Value for Money Kinerja Keuangan Pemkot Surabaya Tahun 2015-2019

Tahun	Analisis Value for Money					
	Aspek Ekonomis		Aspek Efisiensi		Aspek Efektivitas	
	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria
2015	81.86%	Cukup Ekonomis	98.06%	Kurang Efisien	99.65%	Efektif
2016	88.13%	Cukup Ekonomis	104.77%	Tidak Efisien	101.57%	Sangat Efektif
2017	88.27%	Cukup Ekonomis	98.49%	Kurang Efisien	101.63%	Sangat Efektif
2018	88.22%	Cukup Ekonomis	100.02%	Tidak Efisien	101.19%	Sangat Efektif
2019	92.24%	Kurang Ekonomis	104.54%	Tidak Efisien	100.37%	Sangat Efektif
Rata-rata	87.74%		101.18%		100.88%	

Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kota Surabaya, diolah, 2021